



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI JUM'AT, 20 JANUARI 2023



RINGKASAN BERITA HARI INI

Supatir Tokoh Politik Muda Terpopuler dan Tervokal 2022

Sidoarjo, Mestinya - Alhamdulillah Alpi menjadi salah satu tokoh terpopuler dan tervokal di tahun 2022. Alpi adalah salah satu tokoh muda yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Sidoarjo. Alpi adalah salah satu tokoh muda yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Sidoarjo. Alpi adalah salah satu tokoh muda yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Sidoarjo.

KOMISI A DPRD SIDOARJO, GIZI DAN BEBAN POL PP HARUS BERIMBANG

Sidoarjo, Pjok Kiri - Sebagai aparat penegak Perda, Satpol PP kerap diarahkan berdiri di garda terdepan. Namun sayangnya, beban yang mereka tanggung dinilai tak berbanding lurus dengan fasilitas yang diterima. "Satpol PP itu seringkali harus jadi bempes, berhadapan dengan PKL, pemilik bangli (bangunan liar) dan lain-lain. Tapi masalahnya, suplemen atau makanan tambahannya ada enggak?", ucap Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudori.

Pelunasan Biaya Haji di Kisaran Rp 44 Juta

Sidoarjo, Mestinya - Dengan adanya subsidi pemerintah, biaya haji tahun ini diperkirakan akan lebih terjangkau. Pemerintah akan menyalurkan subsidi sebesar Rp 69,1 juta per orang. Biaya langsung (direct cost) berkisar antara Rp 20 juta hingga Rp 30 juta, sementara biaya tidak langsung (indirect cost) berkisar antara Rp 7,31 juta hingga Rp 11,1 juta.

Pemeliharaan Stadion Gelora Delta Mulai Dikerjakan

Sidoarjo, Mestinya - Stadion Gelora Delta Sidoarjo akan segera menjalani pemeliharaan. Pekerjaan pemeliharaan meliputi perbaikan atap, perbaikan struktur, dan perbaikan fasilitas pendukung. Pekerjaan ini akan dilaksanakan selama beberapa bulan ke depan.

Subsidi Mestinya Melihat Lama Antrean

Sidoarjo, Mestinya - Subsidi pemerintah untuk biaya haji harus dilihat dari lama antrean jemaah. Semakin lama antrean, semakin besar subsidi yang harus diberikan. Pemerintah akan menyalurkan subsidi sebesar Rp 69,1 juta per orang.



Ditarget Kelar Akhir 2024

Sidoarjo, Mestinya - Pembangunan flyover di kawasan Aloha-Gedangan ditargetkan selesai pada akhir 2024. Flyover ini akan menghubungkan kawasan Aloha dengan kawasan Gedangan. Panjang flyover mencapai 858 meter.

Jelang Harjasda, Pejabat Sidoarjo Ziarah ke Makam Mantan Bupati

SIDOARJO, SURTA - Sejumlah pejabat dan undangan Pemkab Sidoarjo berziarah ke makam mantan Bupati Suntono Agoes Boto Putih, Surabaya, Kamis (19/1). Ziarah ini merupakan ritual tahunan yang digelar para pejabat menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Sidoarjo Harjasda. Tercatat tahun ini, ketika Sidoarjo bakal segera menginjak usianya yang ke-164.

ZIARAH - Sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo saat ziarah ke makam RA Panji Djimat Tjokronegoro di Boto Putih, Surabaya, Kamis (19/1). Makam tersebut menjadi tempat ziarah rutin para pejabat Pemkab Sidoarjo. Ziarah ini dilakukan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Sidoarjo Harjasda.

Jida Desak Pemkab Bangun JPO di Dua Titik Rawan

Sidoarjo, Mestinya - Jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci diimbau untuk memperhatikan kondisi kesehatan. Pemerintah akan menyalurkan subsidi sebesar Rp 69,1 juta per orang.

Pelunasan Biaya Haji di Kisaran Rp 44 juta

- Kemnag Usul Bipih Tahun Ini Rp 69,1 Juta
- Skema Baru Pembagian Kuota, Jatim Bisa Tambah 7.923 Jemaah

JAKARTA - Calon jemaah haji tahun ini harus mulai menyiapkan dana dalam jumlah cukup besar untuk melunasi ongkos naik haji. Pasalnya, Kementerian Agama (Kemnag) resmi mengusulkan biaya haji 2023 sebesar Rp 98,8 juta. Komponen pembiayaan yang ditanggung jemaah (*direct cost*) mencapai Rp 69,1 juta per orang.



Tahun	Direct Cost	Indirect Cost
2010	Rp 30 juta	Rp 4,45 juta
2011	Rp 32 juta	Rp 7,31 juta
2012	Rp 37,1 juta	Rp 8,77 juta
2013	Rp 43 juta	Rp 11,1 juta
2014	Rp 40 juta	Rp 19,2 juta
2015	Rp 37,49 juta	Rp 24 juta
2016	Rp 34,6 juta	Rp 25,1 juta
2017	Rp 34 juta	Rp 26,9 juta
2018	Rp 35,24 juta	Rp 33,7 juta
2019	Rp 35,24 juta	Rp 33,92 juta
2020	-	-
2021	-	-
2022	Rp 39,89 juta	Rp 57,91 juta
2023	Rp 69,1 juta	Rp 29,7 juta

Subsidi Mestinya Melihat Lama Antrean

Sidoarjo, Mestinya - Subsidi pemerintah untuk biaya haji harus dilihat dari lama antrean jemaah. Semakin lama antrean, semakin besar subsidi yang harus diberikan. Pemerintah akan menyalurkan subsidi sebesar Rp 69,1 juta per orang.

Diperbanyak oleh Subag Pesidangan, Humas dan Risalah Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



KOMISI A DPRD SIDOARJO, GIZI DAN BEBAN POL PP HARUS BERIMBANG

Sidoarjo, Pojok Kiri

Sebagai aparaturne-negak Perda, Satpol PP kerap diharuskan berdiri di garda terdepan. Namun sayangnya beratnya beban yang mereka tanggung dinilai tak berbanding lurus dengan fasilitas yang diterima.

"Satpol PP itu seringkali harus jadi bempem, berhadapan dengan PKL, pemilik bangli (bangunan liar) dan lain-lain. Tapi masalahnya, suplemen atau makanan tambahannya ada nggak?" ucap Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori.

Dengan serempak, sekitar 70 anggota Satpol PP Sidoarjo yang mengikuti Forum Group Discussion (FGD) di Pendopo Kantor Kecamatan Krembung, Selasa (17/1) itu menjawab pertanyaan itu dengan koor, "belum...."

Lebih lanjut legislator PKB itu mengatakan saat ini satuan tersebut harus menghadapi banyak tantangan di tengah-tengah keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras) kerja apalagi fasilitas yang dibutuhkan oleh tiap-tiap personelnya.

"Seragam saja sampai mbulak (pudar warnanya) gitu. Sudah berapa tahun itu nggak diganti? Jangan-jangan sepatunya juga sudah pada mesem semua," imbuh Dhamroni lagi yang langsung disambut dengan teriakan dan tepuk tangan riuh dari peserta FGD itu.

Bukan hanya itu, jika perlu setiap personel Satpol PP yang berada di lapangan harus

dibiayai untuk mendapatkan pelatihan kepribadian sehingga mereka bisa menghadapi masyarakat yang 'marah' secara humanis dan ramah.

Politisi asal Tulangan itu melihat, semestinya Satpol PP Sidoarjo juga harus memiliki bangunan khusus yang bisa dipakai sebagai gudang barang sitaan. Dengan begitu institusi tersebut bisa menjaga piranti milik masyarakat itu bisa terjaga dengan baik sebelum diambil pemilikinya.

Karena itu ia berharap Pemkab Sidoarjo, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa mengalokasikan dana untuk pemenuhan sarpras dan fasilitas itu dalam dokumen-dokumen anggaran, baik di APBD maupun APBD Perubahan yang dibahas di pertengahan tahun.

"Mosok anggota DPRD yang harus urunan dana BK dan Pokir untuk memenuhi biaya penyediaan sarpras dan tambahan vitamin buat Satpol PP. Kalah dengan balita di Posyandu saja dapat extra pudding," gurau Dhamroni

Sementara itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Abdul Haris melihat masih adanya kesimpang-siuran tugas pokok dan fungsi Satpol PP dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Menurutnya tugas utama satuan ini adalah melaksanakan Perda Sidoarjo no 10/2013 tentang ketertiban umum.

"Jadi untuk tugs-tugas sosialisasi seharusnya men-

jadi kewajiban OPD teknis, sedangkan Satpol PP adalah eksekutornya," ujar politisi PAN itu saat mendampingi personel satuan tersebut saat melakukan razia terhadap warung esek-esek di Dusun Biting, Desa Mojojuntut Kecamatan Krembung kemarin.

Haris juga menyoroti soal koordinasi antar OPD yang menurutnya tidak terjalin dengan baik. Ia mencontohkan, obyek yang selesai dieksekusi Satpol PP harusnya dipelihara lebih lanjut oleh OPD teknis terkait agar masalahnya tidak berulang.

Ia pun mencontohkan operasi penertiban PKL yang kerap harus dilakukan berulang-ulang di lokasi yang sama. "Setelah dibersihkan Satpol PP, mestinya OPDnya harus bertindak. Misalnya dengan mendirikan pos jaga disana atau yang lainnya," imbuhnya. Ungkap senada juga disampaikan anggota Komisi A lainnya, Samsul Hadi. Ditambahkannya, pimpinan Satpol PP harus sering-sering berkoordinasi dengan DPRD, terutama terkait kebutuhan anggaran. Sekretaris Satpol PP Sidoarjo, Yanny Setyawan menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian yang diberikan pada legislator pada instansinya. Menurutnya, meski serba terbatas namun Satpol PP tetap akan melakukan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat kota delta. (Nang)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Upaya Tekan Laka Pejalan Kaki

Umsida Desak Pemkab Bangun JPO di Dua Titik Rawan

SIDOARJO - Guna kepentingan masyarakat dan tekan angka kecelakaan lalu lintas, Akademi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) meminta Pemkab Sidoarjo untuk menyediakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Raya Majapahit dan Jalan Raya Gelam.

Urgensi kebijakan JPO ini dirasa penting, salah satunya melihat masih banyaknya warga yang menyeberang di jalur cepat di dua titik tersebut yang bisa membahayakan diri dan terjadi kecelakaan. Selain itu, para akademisi juga menekankan unsur keselamatan bagi warga yang dinilai sering lalulalang di dua jalur tersebut.

"Fakta di lapangan, warga masih menyeberang di jalur cepat dengan membahayakan keselamatan dan mengganggu arus lalu lintas. Sedangkan, hingga kini memang hanya terdapat empat JPO untuk menyeberang di Sidoarjo. Hal itu juga memicu kemacetan dan kecelakaan yang sering terjadi di sekitar RSUD Sidoarjo," kata Dosen Prodi Administrasi Publik Umsida, Ilmi Usrotin Choiriyah saat



Salah satu JPO di Sidoarjo dan Diskusi Akademisi Umsida.

dihubungi, Kamis (19/1/23).

Menurutnya, urgensi pembangunan JPO dianggap penting di beberapa ruas atau titik karena beberapa hal. Diantaranya jalan Mojopahit, dalam lajur cepat, kompleks Kampus Umsida, Masjid Muhammadiyah, lalu lalang pasien dan pengunjung RSUD, serta Kompleks padat.

Sedangkan yang selanjutnya adalah

di titik Jalan Raya Gelam arah Keramean Timur. Di jalan Raya Gelam juga termasuk dalam jalur cepat, dekat juga dengan Kompleks Kampus, Halte Bus trans Jatim masing-masing arah Surabaya-Malang dan Malang-Surabaya.

Senada Eko Hardiansyah, M.psi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas

Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) menyampaikan, saya sangat mendukung dan memiliki harapan yang sama jika pemerintah Sidoarjo membangun JPO Jl. Mojopahit dan di Gelam.

"Secara psikologis, adanya traffic light disertai track lurus jalan di perempatan Mojopahit dari utara dan pertigaan larangan dari selatan memang membawa kecenderungan orang untuk memacu kendaraan lebih cepat," ujar Eko.

Di sisi lain, adanya sumber keramaian di sisi barat dan timur, yaitu kampus 1 UMSIDA, SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo di sisi timur dan RSUD Sidoarjo di sisi barat sangat memungkinkan terjadinya mobilitas massa yang masif terkait penyeberangan. Hal ini yang bila ditambah kurang awasnya pengendara dan penyeberang bisa memunculkan kecelakaan yang cukup serius.

Memang sudah ada pedestrian crossing traffic light (lampu penyeberangan jalan untuk pejalan kaki), namun resiko kecelakaan masih sangat besar terjadi karena belum ada pemisahan

secara fisik antara penyeberang dengan pengendara. Sudah banyak contoh kasus kecelakaan di ruas jalan tersebut yang sampai meninggal dunia.

"Analisis situasi yang sama juga di daerah Gelam Sidoarjo. Track lurus sejauh kurang lebih 1,2 KM antara pertigaan Candi dari utara dan dari daerah Kludan dari selatan hingga depan Umsida kampus 2 memungkinkan pengendara secara psikologis untuk memacu kendaraan, apalagi saat situasi jalan raya sedang lengang. Namun di sisi lain traffic mahasiswa maupun masyarakat umum yang menggunakan kendaraan umum atau berjalan kaki banyak melakukan penyeberangan jalan," papar Eko Kamis (19/1/23).

Masih kata Eko, karena itu, JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) yaitu fasilitas pejalan kaki untuk penyeberang jalan yang ramai dan lebar dengan menggunakan jembatan, sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik menjadi fasilitas yang sangat penting untuk dibangun di ruas jalan tersebut, ini adalah alasan pertama. ●loe

DUTA

Harjasda Ke-164, Rombongan Pejabat Pemkab Sidoarjo Ziarah ke Makam Bupati R.A Panji Djimat Tjokronegoro di Boto Putih

Sidoarjo, Pojok Kiri

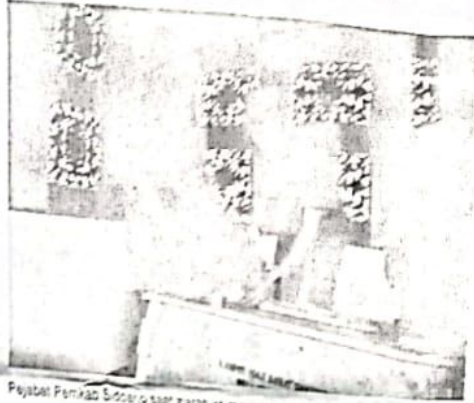
Bupati Sidoarjo ke 2 R. Adipati Panji Djimat Tjokronegoro II dimakamkan di kompleks makam Sentono Agung Boto Putih (Batu Bata Putih) Surabaya. Bupati yang memerintah Kabupaten Sidoarjo di tahun 1863 sampai 1883 itu merupakan salah satu keturunan Sunan Boto Putih. Sunan Boto Putih sendiri merupakan keturunan raja di Blambangan yang dikenal dengan nama Pangeran Kedawung atau Sunan Tawanggalun. Sunan Boto Putih yang terlahir dengan nama Pangeran Lanang Dangiran wafat pada tahun 1638. Ia dimakamkan di kompleks makam Sentono Agung Boto Putih di Jalan Pegirian Surabaya. Makam tersebut telah menjadi cagar budaya.

Pagi tadi, Kamis, (19/1), makam Bupati Sidoarjo R. Adipati Panji Djimat Tjokronegoro II diziarahi pejabat Pemkab Sidoarjo. Ziarah dipimpin Pj. Sekda Sidoarjo Andjar Surjadianto. Ziarah tersebut dalam rangka memperingati hari jadi ke 164 tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo. Ziarah yang menjadi agenda rutin peringatan hari jadi Kabupaten Sidoarjo kali ini dibagi empat tim. Empat tim tersebut menyebar untuk berziarah ke seluruh makam bupati Sidoarjo. Seperti tim satu yang dipimpin oleh Pj. Sekda yang mengawali ziarahnya ke Bupati R. Ng. Soerjadi Kertoprojo di Taman Makam Pahlawan (TMP) yang terletak di Jl. Pahlawan Sidoarjo. Di TMP sekaligus dilakukan apel kehormatan kepada para pahlawan yang dimakamkan ditempat tersebut.

Dari makam Bupati R. Ng. Soerjadi Kertoprojo yang menjabat tahun 1950 - 1958 tersebut, tim satu menuju ke makam Bupati R. T. Tjokronegoro I yang berada di kompleks Makam Asri Hing Pendhem belakang Masjid Agung Sidoarjo. Bupati R. T. Tjokronegoro I memerintah Sidoarjo di era kolonial Belanda, mulai tahun 1859 - 1863. Disamping makam Tjokronegoro I juga dimakamkan Bupati Sidoarjo ke 3 yang bernama R. T. Soemodirejo yang menjabat hanya 3 bulan karena wafat tahun 1883.

Tujuan berikutnya ke makam Bupati Sidoarjo ke 4 yakni R. A. A. P. Tjondronegoro I dan R. A. A. P. Tjondronegoro II yang terletak persis di Baratnya imaman Masjid Agung Sidoarjo. Makam tersebut menjadi kompleks makam keluarga Tjondronegoro. Masih dalam satu kompleks makam, terdapat makam Bupati ke 8 yang bernama R. A. A. Soejadi yang menjabat tahun 1933 - 1947.

Kemudian rombongan bergeser ke kompleks makam Rekso Pralaya yang bersebelahan dengan kompleks makam



Pejabat Pemkab Sidoarjo saat ziarah ke makam Bupati Sidoarjo ke 4

lahan dengan kompleks makam Asri Hing Pendhem, kompleks Masjid Agung Sidoarjo. Di makam Rekso Pralaya inilah Bupati Sidoarjo ke 12, Soewandi dimakamkan. Bupati Soewandi menjabat mulai tahun 1975 - 1985.

Selanjutnya rombongan berangkat ke kompleks makam Sentono Boto Putih Surabaya. Saat masuk ke kompleks makam Sentono Agung Boto Putih, rombongan disambut pengurus Paguyuban Keluarga Keturunan Pangeran Lanang Dangiran atau Sunan Boto Putih. Dalam sambutannya, Pembina Paguyuban Subandi Santoso memberikan buku silsilah keturunan Pangeran Lanang Dangiran kepada Pj. Sekda Andjar Surjadianto. Selain itu juga diberikan kertas manila bertuliskan silsilah Sunan Boto Putih.

Sebelumnya Subandi Santoso menceritakan panjang lebar siapa Pangeran Lanang Dangiran tersebut. Diceritakannya awal mula Pangeran Lanang Dangiran bertempat tinggal di Surabaya. Cerita bermula dari Pangeran Lanang Dangiran atau Sunan Boto Putih yang bertapa dilaut dengan menghanyutkan dirinya diatas sebuah papan kayu yang digunakan sebagai alat penangkap ikan atau beronjong. Tapa tanpa makan atau minum itu membawanya hingga ke laut Jawa. Yang pada akhirnya gelombang besar melemparkan Pangeran Lanang Dangiran dengan beronjongnya dipantai dekat Sedayu dalam keadaan tidak pingsan karena berbulan-bulan tidak makan dan minum.

Sampai akhirnya lanjut Subandi Santoso, tubuh Pangeran Lanang Dangiran ditemukan oleh seorang Kyai yang bernama Kyai Kendil Wesi yang kemudian merawatnya. Dalam ceritanya, Kyai Kendil Wesi juga menganggap Sunan Boto Putih sebagai anaknya. Saat ditemukan, Pangeran Lanang Dangiran menceritakan asal-usulnya kepada Kyai Kendil Wesi. Dari cerita tersebut Kyai Kendil Wesi mengetahui kalau Pangeran Lanang Dangiran satu keturunan dengannya dari

raja-raja di Blambangan yang bernama Menak Soemandi.

Diceritakannya saat ditemukan Kyai Kendil Wesi, seluruh badan Pangeran Lanang Dangiran ditemplei oleh karang, keong serta kerang-kerang kecil atau remis. Kondisi budannya saat itu seperti bertih jagung atau dalam bahasa Jawa disebut "Brondong". Oleh karenanya Pangeran Lanang Dangiran juga dikenal dengan nama Kyai Brondong.

Kemudian lanjut Subandi Santoso Pangeran Lanang Dangiran yang sudah memeluk agama Islam itu diperintahkan Kyai Kendil Wesi untuk pergi ke Ampel Dento Surabaya. Disana Sunan Boto Putih diminta menyebarkan ajaran Agama Islam yang telah diperoleh dari Kyai Kendil Wesi. Sunan Boto Putih atau Kyai Brondong bersama istrinya dan beberapa anaknya menetap di Surabaya mulai tahun 1595. Tempatnya disebarkan Timur Kali Pegirian, dekat Ampel atau Dukuh Boto Putih. Ditempat baru inilah Kyai Brondong mendapatkan kedudukan yang tinggi dimata masyarakat. Masyarakat banyak berguru kepadanya karena keluhuran budi Kyai Brondong atau Pangeran Lanang Dangiran atau Sunan Boto Putih. Wilayah yang dijadikan sebaran Islam oleh Sunan Boto Putih sendiri mulai Pegirian hingga Kapasan serta ujung Utara Surabaya. Sunan Boto Putih wafat pada tahun 1638 atau dalam usia kurang lebih 70 tahun.

Sementara itu tim dua berziarah ke makam bupati H. A. Choedori Amir dipemakaman Islam Jetis Kecamatan Sidoarjo. Tim tersebut juga berziarah ke makam Wakil Bupati Sidoarjo periode 2016-2021, H. Nur Ahmad Syaifuddin di makam Islam Desa Janti Waru. Sedangkan tim tiga menuju makam bupati Kol. Pol. H. R. Soedarsono yang berada di TMP Suropati Malang. Untuk tim empat menuju TPU Kecamatan Mojokerto. Dimakam itu rombongan berziarah ke makam bupati ke 10, R. Samadikoen yang menjabat mulai tahun 1969 - 1964. (Khol/AD)

Bupati Tokoh Politik Muda Terpopuler dan Tervokal 2022

Sidoarjo, Memorandum

Ahmad Muhdlor Ali politisi muda sekaligus Bupati Sidoarjo, masuk dalam deretan nomor enam dari 20 nama politisi muda terpopuler sekaligus politisi muda tervokal di tahun 2022.

Sepak terjang politisi muda dengan usia di bawah 40 tahun itu selama Januari 2022 hingga Desember 2022, telah dicatat oleh lembaga survei Indonesia Indicator.

Hasilnya, nama Ahmad Muhdlor Ali, bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor sangat populer dengan jumlah ekspos pemberitaan maupun jumlah pernyataan yang dikutip media total sebanyak 17.601 pemberitaan.

Indonesia Indicator juga mencatat tingkat kevakalan politisi muda Ahmad Muhdlor berada di urutan ke-7 dengan jumlah ekspos pemberitaan sebanyak 8.021 berita.

Politisi muda yang menduduki nomor 1 yakni putra Presiden Joko Widodo yang saat ini menjabat Wali Kota Surakarta (Solo) Gibran Rakabuming. Dari unggahan di akun twitternya @gibran_tweet ia memposting hasil survey Indonesia Indicator dalam Indonesia Recap 2022.

Kopopuleran Gibran disusul Wali Kota Medan Muhammad Bobby Alf Nasution yang tak lain adik iparnya sendiri. Kemudian ada nama Taj Yasin Maimoon Wakil Jawa Tengah putra Syaikhona KTH Maimun Zubair berada di urutan ke-6 dan ada Eandi Ahmad Yani Bupati Gresik juga masuk dalam jajaran politisi muda terpopuler di urutan ke-11.

Sepak awal menjabat, Gus Muhdlor sudah menunjukkan komitmennya menata dan membangun Sidoarjo dari berbagai sisi.

Ia kemudian menaungkan gagasan itu ke dalam 17 program prioritas yang telah dimasukkan dalam

RPMID tahun 2021 - 2026. Dalam dua tahun terakhir sejak dilantik, Ahmad Muhdlor langsung tancap gas bekerja menggerakkan roda birokrasi secara efektif dan tepat sasaran.

Adapun program yang banyak menjadi perhatian dan sorotan publik adalah terkait berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Mulai dari infrastruktur kesehatan, pendidikan serta proyek infrastruktur jalan.

Sepak terjangnya dalam menggerak pembangunan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Tren positif pembangunan menjadi alasan kuat bagi para investor untuk menentukan pilihan berinvestasi di kota Delta.

Politisi muda yang juga putra Kiai Khos Sidoarjo Pengasuh Forum Progresif Bumi Sholawat Lebo Sidoarjo KH Agoes Ali Masyhan Gus Ali itu, dinilai cerdik dan pandai dalam menggelaborasi birokrasi dengan stakeholder sehingga muncul kepercayaan publik akan adanya perubahan Sidoarjo yang lebih baik.

Menjaga Sidoarjo agar tetap kondusif, aman dan terarah serta mendorong menajaga kerkennan, gyubh dan kompak terus diidungankan Gus Muhdlor setiap kali turun ke bawah. Bagi bupati alumni Fisip Unair Surabaya itu suksesnya pembangunan kuncinya ada pada kondusifitas wilayah.

Pengaruh tokoh muda kota Delta dalam dua tahun sejak dilantik 2021 begitu kuat dirasakan warga Sidoarjo. Pada bidang kesehatan saja ia sudah merealisasikan



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dalam berbagai kegiatan.



pembangunan RSUD Sidoarjo Barat, pada pelayanan dasar kesehatan masyarakat penambahan puskesmas baru sebanyak 5 unit.

Kemudian dalam penguatan pelayanan dasar puskesmas ia tak segan melakukan supervisi langsung kepada seluruh kepala puskesmas. Perbaikan pelayanan juga dilakukan dengan membuka ruang selektif-lebihnya kanal pengaduan melalui call center 112 bebas pulsa.

Dan yang paling menjadi banyak perbincangan di masyarakat yakni masifnya proyek pembangunan jalan beton di desa-desa dan proyek jalan frontage road yang keahadirannya sudah lama dinanti publik. Selain itu, konsolidasi untuk percepatan pembangunan sejumlah proyek nasional ia tuntaskan dalam 2 tahun ini.

Sehingga, tiga titik proyek

nasional yang dibangun di Sidoarjo yaitu Flyover Aloha, Flyover JPL 64 Krian dan Flyover JPL 79 Tarik yang merupakan proyek strategis mengurai kemacetan itu bisa dengan cepat dimulai pembangunannya.

Sentuhan tangan dingin Gus Muhdlor dalam pengembangan UMKM kemandariannya diratakan puluhan ribu pelaku usaha kecil. Melalui program Kurda Sayang, program pinjaman modal usaha kredit dengan bunga sangat ringan hanya 3 persen per tahun mampu menyelamatkan ribuan UMKM dari ancaman krisis pandemi Covid-19. Jumlah kredit yang didisalurkan dalam kurun waktu 2021 - 2022 lebih dari Rp27 miliar.

Program itu membawa dampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi Sidoarjo. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sidoarjo

diangka 4,21 persen naik signifikan dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 3,69 persen.

Aksi tangan dinginnya tidak berhenti pada pembangunan fisik saja, sepanjang tahun 2022 program kerja Gus Muhdlor lainnya yang mendapat perhatian publik yakni bedah warung, bedah rumah serta program bantuan hibah modal usaha bagi kelompok perempuan. Lebih dari 2 ribu kelompok usaha perempuan berbasis IT telah mendapat bantuan modal usaha. Satu kelompok usaha minimal 5 orang perempuan dan maksimal 10 orang.

Pada bidang pendidikan, bupati muda itu terbelang progresif. Dalam dua tahun ini sudah menyiapkan 2 unit sekolah SMP Negeri baru. Bahkan satu sekolah baru saja diremkan. Sekolah itu yakni SMPN 2 Talangan. Dan tahun 2023 ini pembangunan

sekolah baru SMPN 2 Prambon bakal dimulai. Dengan dibangunnya 2 unit sekolah tingkat SMP itu kini setiap kecamatan dari total 18 kecamatan yang ada minimal telah memiliki 2 unit sekolah SMP Negeri.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para stakeholder. Terutama dari insan pers yang selama dua tahun ini telah mengawal program kerja dan kinerja Pemkab Sidoarjo dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan di RPMID.

"Keberhasilan itu tidak akan bisa dicapai oleh kerja satu atau dua orang saja, ini semua hasil kerja bersama. Kerja tim dan dukungan dari stakeholder penting sekali dalam kelancaran pembangunan. Kolaborasi masih akan menjadi panglima dalam membangun Sidoarjo ke depan," tegas Gus Muhdlor (gok/mko)

Jelang Harjasda, Pejabat Sidoarjo Ziarah ke Makam Mantan Bupati

SIDOARJO, SURYA - Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo berziarah ke makam Raden Adipati Panji Djimat Tjokronegoro II di komplek makam Sentono Agung Boto Putih, Surabaya, Kamis (19/1).

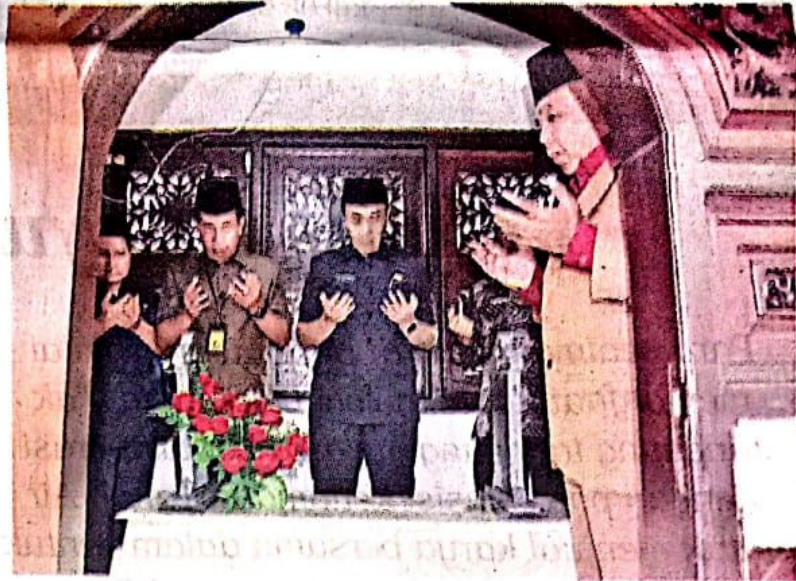
Kegiatan itu merupakan ritual tahunan yang digelar para pejabat menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Sidoarjo (Harjasda). Termasuk tahun ini, ketika Sidoarjo bakal segera menginjak usianya yang ke-164.

Panji Djimat Tjokronegoro II merupakan bupati ke-2 Sidoarjo. Pemimpin Sidoarjo pada tahun 1863 sampai 1883 itu merupakan salah satu keturunan Sunan Boto Putih. Makanya setelah meninggal dunia dimakamkan di kompleks Boto Putih Surabaya.

Dekat dengan makam Sunan Boto Putih yang merupakan keturunan raja di Blambangan dan dikenal dengan nama Pangeran Kedawung atau Sunan Tawangalun. Sunan Boto Putih terlahir dengan nama Pangeran Lanang Dangiran wafat pada tahun 1638, dimakamkan di kompleks makam yang berada di Jalan Pegirikan Surabaya.

Rombongan pejabat yang berziarah ke Boto Putih dipimpin oleh Sekda Sidoarjo Andjar Surjadianto. "Selain ini, ada rombongan lain yang juga menggelar kegiatan serupa di kompleks makam lainnya," kata Andjar.

Ada empat kelompok pejabat, mereka menyebar untuk berziarah ke seluruh makam bupati Sidoarjo. Ziarah pertama digelar di



SURYA/M TOVIC

ZIARAH - Sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo saat ziarah ke makam RA Panji Djimat Tjokronegoro di Boto Putih, Surabaya, Kamis (19/1).

makam Bupati R.Ng. Soeriadi Kertoprojo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Sidoarjo. Di TMP sekaligus dilakukan apel kehormatan kepada para pahlwan yang dimakamkan di tempat tersebut.

Dari makam Bupati R.Ng. Soeriadi Kertoprojo yang menjabat tahun 1950 - 1958 tersebut, tim satu yang dipimpin Andjar menuju ke makam Bupati R.T Tjokronegoro I yang berada di komplek Makam Asri Hing Pendhem belakang Masjid Agung Sidoarjo. Bupati R.T Tjokronegoro I memerintah Sidoarjo di era kolonial Belanda, mulai tahun 1859 - 1863.

Disamping makam Tjokronegoro I juga dimakamkan Bupati Sidoarjo ke 3 yang bernama R.T Soemodirejo. Dia menjabat hanya 3 bulan karena wafat tahun 1883.

Dari sana rombongan

bergeser ke makam Bupati Sidoarjo ke 4 dan 5 yakni R.A.A.P. Tjondronegoro I dan R.A.A.P. Tjondronegoro II yang terletak persis di Baratnya imaman Masjid Agung Sidoarjo.

Makam tersebut menjadi komplek makam keluarga Tjondronegoro. Masih dalam satu kompleks makam, terdapat makam Bupati ke 8 yang bernama R.A.A. Soejadi yang menjabat tahun 1933 - 1947.

Kemudian rombongan bergeser ke kompleks makam Reksa Pralaya yang bersebelahan dengan kompleks makam Asri Hing Pendhem, komplek Masjid Agung Sidoarjo. Di makam Reksa Pralaya inilah Bupati Sidoarjo ke 12, Soewandi dimakamkan. Bupati Soewandi menjabat mulai tahun 1975 - 1985. Selanjutnya rombongan berangkat ke komplek makam Sentono Boto Putih Surabaya. (ufi)

Pelunasan Biaya Haji di Kisaran Rp 44 Juta

- Kemenag Usul Bipih Tahun Ini Rp 69,1 Juta
- Skema Baru Pembagian Kuota, Jatim Bisa Tambah 7.923 Jemaah

JAKARTA - Calon jemaah haji tahun ini harus mulai menyiapkan dana dalam jumlah cukup besar untuk melunasi ongkos naik haji. Pasalnya, Kementerian Agama (Kemenag) resmi mengusulkan biaya haji 2023 sebesar Rp 98,8 juta. Komponen pembiayaan yang ditanggung jemaah (*direct cost*) mencapai Rp 69,1 juta per orang =

► Baca Pelunasan... Hal 11



Yaqut Cholliq Qoumas

BIAYA HAJI DARI TAHUN KE TAHUN

Tahun	Direct Cost	Indirect Cost
2010	Rp 30 juta	Rp 4,45 juta
2011	Rp 32 juta	Rp 7,31 juta
2012	Rp 37,17 juta	Rp 8,77 juta
2013	Rp 43 juta	Rp 14,11 juta
2014	Rp 40 juta	Rp 19,24 juta
2015	Rp 37,49 juta	Rp 24 juta
2016	Rp 34,6 juta	Rp 25,4 juta
2017	Rp 34 juta	Rp 26,9 juta
2018	Rp 35,24 juta	Rp 33,72 juta
2019	Rp 35,24 juta	Rp 33,92 juta
2020	-	-
2021	-	-
2022	Rp 39,89 juta	Rp 57,91 juta
2023	Rp 69,1 juta	Rp 29,7 juta

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Jawa Pos

Pelunasan Biaya Haji di Kisaran Rp 44 Juta

Sambungan dari hal 1

Dengan setoran awal Rp 25 juta, maka setiap jemaah tinggal membayar pelunasan sekitar Rp 44 juta.

Usulan biaya menunaikan rukun Islam kelima itu disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholliq Qoumas pada rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta kemarin (19/1). Usul Kemenag itu akan dibahas lebih dulu dengan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara pemerintah dan DPR. Perkiraan angka final biaya haji bakal ditetapkan bulan depan.

Yaqut mengatakan, secara umum, usulan biaya haji tahun ini hanya naik sedikit ketimbang tahun lalu. BPIH atau biaya riil haji tahun lalu mencapai Rp 98,379 juta. Sementara itu, usulan BPIH tahun ini Rp 98,893

Juta atau naik Rp 514 ribuan. Yang membedakan, tahun lalu porsi biaya yang ditanggung jemaah (biaya perjalanan ibadah haji/bipih) hanya Rp 39,886 juta. Biaya haji dari hasil pengelolaan dana haji di BPKH sebesar Rp 58,493 juta. Jika dipersen-tasekan, tahun lalu jemaah membayar 40,54 persen. Sisanya sebanyak 59,46 persen berasal dari hasil pengelolaan dana haji di BPKH.

Kebijakan pemerintah tahun ini sebaliknya. Tahun ini porsi jemaah lebih besar, yaitu 70 persen. Subsidi atau pembiayaan dari BPKH hanya 30 persen. Akibatnya, tahun ini Kemenag mengusulkan biaya haji yang dibayar jemaah (*direct cost*) sebesar Rp 69,1 juta atau hampir dua kali lipat dari tahun lalu. Sementara itu, pembiayaan dari BPKH hanya Rp 29,7 juta. "Kebijakan

ini diambil dalam rangka menyeimbangkan antara dana jemaah dan keberlanjutan BPKH," kata Yaqut. Kebijakan memperbesar porsi pembiayaan langsung diambil dengan memper-tingkatkan likuiditas dana haji pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah tidak ingin porsi pembiayaan haji dari BPKH terlalu besar, bahkan melebihi 50 persen.

Biaya langsung yang dibebankan kepada jemaah haji nantinya murni untuk tiket pesawat sebesar Rp 33,97 juta. Kemudian, sebagian sewa hotel Makkah dan Madinah Rp 18,7 juta dan Rp 5,6 juta. Lalu, *living cost* atau uang saku Rp 4 juta, visa Rp 1,2 juta, dan biaya layanan masyair Rp 5,5 juta.

Kemenag mengusulkan pengurangan biaya *living cost* untuk jemaah haji. Tahun lalu setiap jemaah ke-

tika sudah masuk asrama haji menerima uang saku 1.500 riyal. Tahun ini jemaah diizinkan menerima uang saku 1.000 riyal.

Sepanjang hari kemarin, Kemenag menggelar dua kali rapat dengan Komisi VIII DPR. Sebelum usulan biaya haji, rapat membahas evaluasi haji 2022 dan persiapan haji 2023. Pada rapat tersebut, Menag menyampaik-an jadwal atau rencana perjalanan haji (RPH) 2023. Sesuai jadwal yang ditentukan, jemaah mulai masuk asrama haji pada 23 Mei. "Kemudian, kloter 1 jemaah haji gelombang pertama diterbangkan menuju Madinah pada 24 Mei," terangnya. Lalu, kloter 1 jemaah haji gelombang kedua mulai terbang menuju Jeddah pada 8 Juni.

Puncak haji, yaitu wukuf di Arafah, dilakukan pada

27 Juni. Setelah itu, jemaah mulai dipulangkan ke tanah air dari Jeddah pada 4 Juli. Kemudian, pemulangan dari Madinah mulai 19 Juli. Misi pemulangan jemaah haji berjalan sampai 2 Agustus.

Yaqut kembali mengingatkan bahwa tahun ini kuota haji kembali normal. Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221 ribu orang. Kuota tersebut dibagi untuk haji reguler sebanyak 203.320 orang dan haji khusus 17.680 orang. Sementara itu, kuota petugas haji tahun ini ada 4.200 orang.

Dia menyatakan, Kemenag mengusulkan skema baru dalam pembagian kuota haji. Yani, menggunakan skema proporsional berdasar lama-nya antrean haji. Namun, bakal ada provinsi yang kuota hajinya berkurang. Sebaliknya, ada provinsi yang kuota hajinya bertambah. Dia mencontohkan, dengan skema baru itu, kuota haji di Jawa Barat berkurang 8.458 orang. Sementara itu, kuota haji di Jawa Timur bertambah 7.923 jemaah.

Ketua Komisi VIII DPR Asha-bul Kahfi menyebut apresiasi

penyelenggaraan haji 2022 berjalan lancar. Kemudian, hasil lobi-lobi menghasilkan keputusan kuota haji kembali normal. Saat memimpin rapat soal persiapan haji, dia hanya menyoroti antrean haji yang begitu panjang. "Kemarin saya di-WA teman saya. Dia mendaftar (haji) bulan kemarin, menunggu sampai 2019," ungkapnya.

Kahfi mengatakan, sampai saat ini belum ada solusi signifikan dari pemerintah untuk mengurai antrean haji tersebut.

Investasi Dana Haji

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadul Imansyah memaparkan perkembangan pengelolaan dana haji. Saldo dana haji per 31 Desember 2022 adalah Rp 166,01 triliun. Naik dibandingkan posisi 31 Desember 2021 yang tercatat Rp 156,79 triliun.

Kemudian, hasil investasi dana haji pada 2022 tercatat Rp 10,08 triliun. Capaian hasil investasi itu di atas target yang dipatok Rp 9,07 triliun. Namun, catatan hasil investasi 2022 sedikit lebih rendah jika dibandingkan periode 2021 yang mem-

bukukan hasil Rp 10,52 triliun. "Jadi, memang kalau secara umum kami sam-paikan, seluruh dana kelo-laan haji dan dana abadi umat dikelola secara opti-mal," paparnya. Dia meng-atakan, persentase imbal hasil atau *yield* 6,28 persen dalam satu tahun bersih tanpa dipotong pajak.

Fadul melanjutkan, BPKH kembali menjajaki peluang investasi langsung. Khus-usnya investasi layanan terkait perhajian. Misalnya, layanan hotel, katering, dan transportasi jemaah haji selama di Saudi. Tujuan investasi langsung itu bukan hanya untuk menghasilkan *return* pengelolaan dana haji, tapi juga efisiensi pengelolaan haji. Dengan demikian, biaya haji bisa ditekan. "Singkat cerita, be-ban biaya haji ke depan se-makin menantang," ujarnya.

Karena itu, diperlukan terobosan pengelolaan dana haji untuk meningkatkan nilai manfaat atau hasil in-vestasi. Dia menegaskan bahwa BPKH sebagai juru bayar. Ketetapan biaya haji kewenangan Kemenag ber-sama DPR. (wan/c18/fal)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemeliharaan Stadion Gelora Delta Mulai Dikerjakan



WARNA-WARNI : Pekerja sedang mengecat bangunan di kawasan Gelora Delta dalam rangka pemeliharaan.

KOTA-Stadion Gelora Delta bersolek. Proyek pemeliharaan gedung fasilitas olahraga di Sidoarjo itu mulai dikerjakan.

Menurut pantauan Radar Sidoarjo Kamis (19/1), sejumlah pekerja nampak beraktifitas di lokasi stadion. Ada yang mengecat gedung luar stadion, mengecat tribun, hingga mengecat lampu stadion yang ada di ketinggian.

Wajah stadion lebih berwarna. Karena cat yang kusam telah diperbarui. Tribun penonton juga dicat warna-warni. Ada warna hijau, merah muda, kuning hingga ungu.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo Djoko Supriyadi mengungkapkan, total ada sekitar 50 pekerja dikerahkan dalam proyek tersebut.

Proyek senilai Rp 2,4 miliar itu sebagian besar memang pengerjaan pengecatan. "Harapan kami bisa tuntas sebelum 7 Februari," terangnya.

Djoko menambahkan, pengecatan stadion itu juga salah satu persiapan untuk event nasional yang bakal digelar di Sidoarjo. Yakni resepsi puncak 1 abad Nahdlatul Ulama (NU).

Pengerjaan pemeliharaan itu sudah berjalan sekitar satu pekan. Untuk warna cat juga tidak ada pergantian, tapi lebih memperbarui warna lama yang sudah pudar.

Selanjutnya, Disporapar Sidoarjo juga bakal bersiap untuk event olahraga provinsi. Yakni Pekan Olahraga Provinsi Jatim 2023. Pengecatan stadion juga mendukung kegiatan tersebut. (son/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

THE LOBSTER



DIRATAKAN : Lapangan Desa Siwalanpanji yang sedang diperbaiki untuk Deltras FC Akademi.

Februari, Lapangan Siwalanpanji Bisa Digunakan Akademi

BUDURAN-Pembangunan pusat kegiatan Deltas FC Akademi di Lapangan Desa Siwalanpanji terus dikebut. Targetnya Februari nanti lapangan itu sudah bisa digunakan.

CEO Deltras Sidoarjo Amir Burhanuddin mengungkapkan, ada beberapa pengerjaan prioritas di lapangan itu. Utamanya terkait

pemerataan dan penambahan sejumlah sarana dan prasarana. "Rencananya pengerjaan bisa tuntas minggu kedua Februari. Agar bisa segera digunakan untuk latihan," terangnya.

Nantinya lapangan itu juga bakal ditambah sejumlah fasilitas penunjang. Seperti toilet, ruang ganti, parkir, hingga tempat

duduk yang dikemas seperti kafe sebagai tempat para orang tua pemain menonton.

Amir menambahkan, pembangunan akademi itu merupakan wujud keseriusan Deltras untuk memajukan sepak bola di Sidoarjo. Pendaftaran peserta untuk masuk akademi juga telah dibuka.

● Ke Halaman 10



Februari, Lapangan...

Deltras juga telah memining Fakhri Husaini untuk menjadi Direktur Akademi.

Diharapkan pengalamannya di dunia kepelatihan dapat berguna untuk akademi. Utamanya mence-tak bibit-bibit atlet sepak bola berkualitas. (son/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SIDOARJO

✓



Ditarget Keluar Akhir 2024

SEJUMLAH alat berat mulai beroperasi untuk membuat struktur penopang *flyover* Aloha, Sidoarjo, kemarin (19/1). Pembangunan *flyover* sepanjang 858 meter dengan lebar 9 meter itu bakal berlangsung selama 540 hari kalender. *Flyover* diharapkan mampu mengurangi kemacetan di kawasan Aloha-Gedangan. (*)

Jawa Pos

Pujijandoko bersama guru pembina mendampingi peserta didik...

Seni Budaya Membatik Perlu Dikenalkan Sejak Dini

Sidoarjo, Bhirawa

Banyak masyarakat yang mencintai batik, memakai pakaian batik yang harganya sangat mahal sekalipun. Namun mereka belum pernah merasakan, betapa sulitnya belajar membatik. Harus telaten, harus teliti dan yang paling penting juga harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Itulah ungkapan Tri Susanti, SPd guru SDN Kemiri Buduran Sidoarjo saat mengantar siswa-siswinya dalam kegiatan 'Kunjungan Sekolah dan Belajar Membatik Bersama SMP Sepuluh Nopember' Sidoarjo, pada Kamis (19/1) kemarin.

Menurutnya saat menorehkan lilin ke pola itu sangat susah sekali. Apalagi kondisinya sangat panas, jangan sampai lilinya jatuh atau menetes. Untuk memegang Canting (alat pembatik_red) saja baru pertama kali ini. "Waduh ternyata sangat susah sekali. Makahnya harganya sangat mahal," ungkapnya.

Sri Ratnawati, SPd guru SDN Pucang V Sidoarjo juga mengalami hal yang sama, setelah mencoba ternyata sangat sulit sekali. Jadi batik ini merupakan warisan leluhur, budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Seluruh

masyarakat Indonesia hampir semuanya senang memakai batik, namun yang melestarikan sangat jarang sekali, bahkan sangat langka sekali.

"Saya saja baru kali ini memegang Canting (alat pembatik_red). Ternyata mudah dilihat dan susah untuk dilakukan. Tapi saya senang sekali," katanya.

"Sulitnya adalah saat mengambil, mengatur lilinya agar tidak menetes, saat menorehkan ke pola/kain juga harus proporsional, tidak melebar. Jadi akurasinya harus betul-betul pas, harus tepat," terang Tri Susanti.

Oleh karena itu, kedua menyimpulkan kalau program yang digagas SMP Sepuluh Nopember ini sangat bagus sekali, sangat perlu dikembangkan ke sekolah yang lain dan perlu ditindaklanjuti. Mereka sangat perlu sekali dikenal, bahkan sampai dipraktekkan membatik sejak dini. Kalau bukan kita lalu siapa lagi yang melestarikan budaya tradisional yang ada di Indonesia ini. "Sekali lagi, ternyata membatik tidak gampang, sangat sulit dan butuh ketelatenan, makanya saya berharap perlu sekali dipernalkan sejak dini," harap Tri Susanti. [ach.why]



ahmad suprayog/bhiraw

Guru pendamping dan siswa SDN Pucang 5 Sidoarjo bersama-sama belajar membatik



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Subsidi Mestinya Melihat Lama Antrean

PENGAMAT kebijakan haji dan umrah Ade Marfuddin tidak kaget dengan melonjaknya komponen biaya haji yang menjadi tanggungan jemaah. Sebab, saat musim haji 2022 selesai, sudah santer dikabarkan soal kenaikan biaya haji 2023.

Ade menjelaskan, kenaikan biaya haji yang ditanggung

jemaah itu imbas dari dikurangnya porsi pembiayaan dari BPKH. Kebijakan tersebut diambil karena hasil evaluasi pembiayaan haji 2022. Dia mengatakan, semua pihak sepakat bahwa porsi pembiayaan haji dari BPKH pada musim haji tahun lalu terlalu besar. ▶ *Baca Subsidi... Hal 11*

Jawa Pos

Subsidi Mestinya Melihat Lama Antrean

Sambungan dari hal 1

Melebihi 50 persen. "Sekarang kembali pada makna sesungguhnya dari biaya haji," ujarnya kemarin (19/1).

Ade menuturkan, biaya haji sejatinya menjadi tanggung jawab jemaah seluruhnya. Sebab, haji harus memenuhi aspek *istito'ah* atau kemampuan secara finansial maupun kesehatan. Jadi, jika nanti biaya *direct cost* benar-benar ditetapkan Rp 69 juta, kemudian ada jemaah yang tidak mampu melunasi, hajinya ditunda dulu. Dia menegaskan, ibadah haji dikerjakan umat Islam yang mampu. Pada konteks saat ini, mampu itu adalah kemampuan membayar biaya pendaftaran haji dan melunasinya saat namanya dipanggil.

Yang menjadi sorotan Ade adalah kucuran hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH

yang masih bersifat gelondongan. Dalam usulan Kemenag, setiap jemaah mendapatkan alokasi pembiayaan (subsidi) dari BPKH sebesar Rp 29,7 juta.

Seharusnya, menurut Ade, setiap jemaah mendapatkan alokasi subsidi berbeda-beda. Sebab, meskipun sama-sama berangkat haji pada tahun ini, lama mengantrenya berbeda-beda. "Ada yang baru mengantre sepuluh tahun. Ada yang sudah belasan tahun," katanya. Jemaah yang masa antrenya berbeda-beda itu seharusnya mendapatkan nilai manfaat yang berbeda juga.

Karena itu, tutur Ade, BPKH harus menggunakan akun virtual yang baik untuk setiap jemaah. Jadi, tiap-tiap jemaah bisa mengetahui hasil pengelolaan dananya sendiri-sendiri. Yang bersangkutan juga harus melunasi sesuai

dengan jumlah biaya haji riil dikurangi setoran awal dan nilai manfaat yang diterima.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengungkapkan, pelaksanaan ibadah haji 2023 akan kembali normal.

Mengenai usulan pemerintah yang menaikkan BPIH, menurut Marwan, tidak terlalu signifikan. Hanya, dalam posturnya memang ada yang berubah. Yakni, subsidi atau beban yang diberikan kepada nilai manfaat yang dikelola BPKH dikurangi. Porsinya menjadi 30 persen, sisanya 70 persen dibebankan kepada jemaah. Namun, menurut dia, hal tersebut sudah ideal. "Karena memang orang yang berangkat haji itu harus berkemampuan. Baik dari sisi pembiayaan, kesehatan, dan lainnya," ucap dia. (wan/gih/c9/oni)

Jawa Pos

Viral, Polisi Momong Bayi saat Bertugas

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Petugas Polsek Wonoayu, Sidoarjo, mendadak viral di media sosial. Hal ini lantaran petugas tersebut menggendong dan merawat bayi di mako setempat. Bayi itu ditinggal ibunya ke rumah sakit untuk visum, karena menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam video yang sempat direkam oleh sesama petugas polisi itu, nampak Aiptu Dadang Purwadi sedang menggendong balita. Di depannya ada petugas SPKT yang sedang melayani pelaporan masyarakat.

Aiptu Dadang menjelaskan, pada Rabu sore (18/1) ada seorang ibu berinisial CWE (23) sedang membawa bayi ke mapolsek untuk melaporkan suaminya berinisial NIL (23) karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang mengalami luka di bagian muka akibat dipukul suaminya itu, disarankan petugas untuk visum ke rumah sakit. Sementara bayi korban KDRT ditinggal di Polsek Wonoayu.

"Karena saya teringat cucu, akhirnya tersentuh dan kasihan Mas. Spontan, bayi itu lalu saya gendong," kata Aiptu Dadang Purwadi, Kamis (19/1).

Kapolsek Wonoayu AKP Hafid Dian membenarkan jika ada anggotanya sedang merawat dan menggendong bayi. Ia mengungkapkan, aksi positif seperti itu sering disampaikan kepada jajarannya, agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Terkait kekerasan dalam rumah tangga, AKP Hafid mengatakan bahwa korban dan pelaku saat ini tinggal di kos-kosan kawasan Desa Semambung, Wonoayu. Karena tak tahan dengan perlakuan suaminya, korban lantas melaporkan kejadian kekerasan tersebut ke Polsek Wonoayu.

Kapolsek Wonoayu mengimbau kepada masyarakat, agar kejadian kekerasan di dalam rumah tangga tidak sampai terulang kembali, karena hal itu ada hukumnya.

"Hingga saat ini, kami masih memintai keterangan lebih lanjut kepada korban dan pelaku KDRT. Semoga tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga di kemudian hari. Sehingga masyarakat di Kecamatan Wonoayu khususnya dan umumnya di Sidoarjo bisa hidup dengan aman, nyaman, dan tentram," pungkas AKP Hafid. (cat/rd)



Tangkapan layar anggota Polsek Wonoayu menggendong bayi ketika bertugas.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua DPC PKB



DARYANTO/DUTA

Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, H. Subandi, SH.

Dukung Jabatan Kades 9 Tahun

SIDOARJO - Ketua DPC PKB Sidoarjo, H. Subandi, SH menyampaikan alasannya mendukung perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) menjadi sembilan tahun selama satu periode. Selain itu, juga dibatasi maksimal 2 periode.

Ini menyusul masa jabatan enam tahun membuat kades tidak bisa bekerja secara maksimal menjalankan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMDes.

Selain itu, penambahan masa jabatan ini sengaja diusulkan. Alasannya, selama ini Kades dinilai kurang efektif bekerja membangun desa. Apalagi kerap disibukkan menyelesaikan konflik yang selalu muncul setelah Pilkades.

“Dengan penambahan masa jabatan itu maka kinerja Kades akan lebih efektif. Karena waktunya tidak lagi dihabiskan menyelesaikan konflik akibat Pilkades saja,” ujar Subandi, Kamis (19/1).

Selain itu, menurut Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo yang juga mantan Kades Pabean, Sedati ini menjelaskan berdasarkan hasil beberapa kajian akademik menjelaskan penyelesaian konflik akibat Pilkades membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Begitu juga saat menyiapkan Pilkades berikutnya membutuhkan waktu sedikitnya satu tahun.

“Ketika masa jabatan hanya enam tahun, maka untuk menyelesaikan ketegangan pasca Pilkades dua tahun berarti kepemimpinan yang kondusif efektif kurang lebih dua sampai tiga tahun, meskipun tiga periode,” jelasnya.

Di sisi lain, Subandi sangat meyakini meski yang diubah masa jabatan Kades, para perangkat desa juga akan ditata untuk semakin baik dan maksimal. “Karena masa jabatan perangkat desa tidak bisa disamakan dengan masa jabatan Kades karena posisinya berbeda. Posisi Kades adalah jabatan politik. Sedangkan perangkat desa tidak jabatan politik,” katanya. ●dar

DUTA



alikusyanto/bhirawa

Pengurus lembaga agama Islam dan para Kasi Kesra dari 18 Kecamatan, hadir mengikuti penyampaian tata cara pengajuan dana hibah untuk renovasi tempat ibadah.

Ponpes di Sidoarjo Dapat Hibah Rp25 Juta

Sidoarjo, Bhirawa

Pondok pesantren di Kab Sidoarjo tahun 2023 ini akan mendapat bantuan hibah dari Pemkab Sidoarjo, untuk renovasi bangunan. Per Ponpes sebesar Rp25 juta. Pada tahun ini rencananya dianggarkan untuk 4 Ponpes.

Selain bantuan hibah renovasi untuk Ponpes, tahun 2023 ini, Pemkab Sidoarjo juga akan membantu untuk renovasi bangunan masjid, mushola dan majelis taklim.

Untuk masjid sebanyak 31 buah, mushola 30 dan majelis taklim 1 buah. Besaran bantuan untuk per masjid sebesar Rp15 juta, untuk mushola Rp10 juta dan majelis taklim Rp20 juta.

Bagian Kesra Pemkab Sidoarjo, Kamis (19/1) kemarin, mengundang para kasi Kesra yang ada di 18 Kecamatan, dan perwakilan dari NU, Muhammadiyah, LDII dan Dewan Masjid Indonesia, total ada sekitar 118 orang undangan, menyampaikan program bantuan hibah renovasi tempat ibadah tersebut.

"Mereka yang kita undang ini, kita harapkan bisa meneruskan cara-cara pengajuan bantuan hibah renovasi tempat ibadah kepada Pemkab Sidoarjo," jelas Abdul Munip, staf Bagian Kesra, dalam kegiatan yang digelar di ruang rapat Delta Graha, Setda Sidoarjo tersebut.

Dikatakan Munip, pengajuan bantuan ini harus dikirimkan dengan dua cara. Pertama, dengan hard copy yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo. Kedua, pengajuan dikirim dengan menggunakan aplikasi lewat sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). "Kami berharap semoga bisa segera disampaikan kepada pengurus takmir masjid di lingkungannya," kata Munip. [kus.why]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Alasan Ketua DPC PKB Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kinerja Kades akan Lebih Efektif

Sidoarjo, Memo X

Ketua DPC PKB Sidoarjo, Subandi menyampaikan alasannya mendukung perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) menjadi sembilan tahun selama satu periode. Selain itu, juga dibatasi maksimal 2 periode. Ini menyusul masa jabatan enam tahun membuat kades tidak bisa bekerja secara maksimal menjalankan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMDes.

Selain itu, penambahan masa jabatan ini sengaja diusulkan. Alasannya, selama ini Kades dinilai kurang efektif bekerja membangun desa. Apalagi kerap disibukkan menyelesaikan konflik yang selalu muncul setelah Pilkades.

"Dengan penambahan masa jabatan itu maka kinerja Kades akan lebih efektif. Karena waktunya tidak lagi dihabiskan menyelesaikan konflik akibat Pilkades saja," ujar Subandi kepada Memo X, Kamis (19/01/2023).

Selain itu, Wabup Sidoarjo yang juga mantan Kades Pabean ini



Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, Subandi

menjelaskan berdasarkan hasil beberapa kajian akademik menjelaskan penyelesaian konflik akibat Pilkades membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Begi-

tu juga saat menyiapkan Pilkades berikutnya membutuhkan waktu sedikitnya satu tahun.

"Ketika masa jabatan hanya enam tahun, maka untuk

menyelesaikan ketegangan pasca Pilkades dua tahun berarti kepemimpinan yang kondusif efektif kurang lebih dua sampai tiga tahun, meskipun tiga periode," jelasnya.

Di sisi lain, Subandi sangat meyakini meski yang diubah masa jabatan Kades, para perangkat desa juga akan ditata untuk semakin baik dan maksimal. "Karena masa jabatan perangkat desa tidak bisa disamakan dengan masa jabatan Kades karena posisinya berbeda. Posisi Kades adalah jabatan politik. Sedangkan perangkat desa tidak jabatan politik," tandas orang nomor dua di Sidoarjo ini.

Diberitakan sebelumnya, ribuan Kepala Desa meluruk gedung DPR RI. Mereka menyampaikan tuntutan merevisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mereka menuntut agar masa jabatan Kades diubah dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Tuntutan itu, disetujui Komisi II DPR RI. (par/wan)

Momong Bayi Korban KDRT saat sang Ibu Dirawat

SIDOARJO - Rabu (18/1) malam, seorang perempuan datang ke Mapolsek Wonoayu dengan wajah penuh darah. CWE, perempuan malang itu, mengaku baru saja mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dia hendak melaporkan keberingasan si suami kepada polisi. Perempuan 23 tahun itu pun harus menjalani visum ke rumah sakit. Masalahnya, dia membawa sang buah hati yang masih bayi.

Aiptu Dadang Purwadi, salah seorang petugas polsek, menawarkan diri untuk menggendong bayi perempuan yang belum genap setahun itu. Sembari menimang, dia membaca doa agar si kecil tak rewel. "Saya ingat cucu saya, akhirnya saya bantu timang sembari ibunya bikin laporan," ujarnya ketika ditemui kemarin (19/1). Seorang rekannya merekam kejadian itu, lantas mengunggahnya ke media sosial. Aiptu Dadang pun viral.

Sekitar pukul 20.30, korban ditemani petugas reskrim untuk melakukan visum dan perawatan. Sementara itu, bayi beserta tas korban ditinggalkan di mapolsek. Baru sekitar pukul 22.00, salah seorang keluarga korban datang menjemput bayi tersebut dan membawa kepada ibunya di rumah sakit.

Kapolsek Wonoayu AKP Hafid Dian menyatakan bahwa hal tersebut memang cukup unik. "Tentu itu menjadi kewajiban kami juga dalam mengayomi, terutama pelapor sedang dalam kondisi kesusahan," ungkapnya. (eza/c12/any)



POLSEK WONOAYU UNTUK JAWA POS

TERINGAT CUCU: Aiptu Dadang Purwadi menimang bayi korban KDRT yang harus menjalani perawatan dan visum di rumah sakit.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓ Seleksi Tuntas, 1.038 Anggota PPS Dilantik Pekan Depan

KOTA-Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo sudah tuntas. Mereka berasal dari 346 desa yang ada di Sidoarjo. Nama-nama anggota PPS yang lolos seleksi tertuang dalam surat pengumuman nomor 53/PP.04.1-Pu/3515/2023 tertanggal 18 Januari 2023.

Ketua KPU Sidoarjo M Iskak mengatakan, ada 1.038 anggota PPS yang terpilih. Mereka akan dilantik serentak pada Selasa pekan depan. Rencananya pelantikan akan dilakukan di MPP.

Setelah dilantik, para anggota PPS tersebut akan langsung melaksanakan tugas pertamanya. Yakni membentuk Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu 2024.

Dia menjelaskan, mulai 29 Januari nanti pembentukan Pantarlih harus sudah dilaksanakan secara serentak di semua desa.

"Kami berharap PPS terpilih bisa melaksanakan seluruh tahapan pemilu di

tingkat desa dengan baik," katanya.

Menurut dia, kunci kesuksesannya adalah dengan tetap mengedepankan profesionalitas, kejujuran dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan semua tahapan. Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjaringan PPS tersebut

diikuti 3.972 orang yang mendaftar di KPU Sidoarjo. Dari jumlah itu 2.727 orang di antaranya dinyatakan lolos administrasi dan mengikuti tes tertulis.

Hasilnya, 1.893 orang dipanggil kembali untuk mengikuti tes wawancara sebagai dasar menetapkan 1.038 orang anggota PPS terpilih. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PT ISS Layangkan Somasi Pertama, Dishub Kirim Somasi Kedua

Kisruh Pengelolaan Parkir Sidoarjo

SIDOARJO - Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo dan PT Indonesia Sarana Servis (ISS)-Kerja Sama Operasi (KSO) selaku pihak ketiga pengelola parkir saling mengirim somasi. Keduanya keukeuh pada keputusan masing-masing.

Dishub Sidoarjo bersikukuh meminta titik parkir diserahkan dan PT ISS menyetorkan hasil retribusi

parkir ke daerah. Sementara PT ISS keukeuh bahwa dishub menyalahi aturan jika memutus perjanjian kerja sama (PKS).

Awalnya ISS hendak mengirimkan somasi pertama ke dishub pada Senin (16/1), tapi mundur hingga terkirim pada Rabu (18/1). Setidaknya ada sebelas poin yang disampaikan ISS lewat surat tersebut. Antara lain, ISS meminta dishub tetap menaati isi PKS dengan kewajiban melakukan perubahan perjanjian dari 359 titik menjadi 87 titik sesuai kajian konsultan.

Jika dishub tetap minta 359 titik, ISS harus membayar Rp 2,7 miliar tiap bulan. Sebab, nilai 359 titik adalah Rp 32,09 miliar per tahun. Nah, ISS keberatan karena kenyataannya yang jalan hanya 87 titik. Total pendapatan kotor (bruto) dari 87 titik parkir tersebut hanya sekitar Rp 1,01 miliar per bulan.

"Jika tetap dihitung 359 titik, PT ISS rugi Rp 1,7 miliar per bulannya. Padahal, faktanya hanya 87 titik," jelas Direktur Operasional PT ISS Dian Sutjipto. Karena itulah, pihak-

nya menginginkan adendum agar kerja sama sesuai 87 titik tersebut.

Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan somasi kedua pada Rabu (18/1) lalu. Isinya sama, yakni meminta titik parkir diserahkan dan hasil retribusi parkir juga diserahkan ke Dishub Sidoarjo. Pihaknya tetap pada keputusan memutus kerja sama.

Jika nanti ISS tidak memenuhi permintaan dishub, pihaknya akan menggugat dan menyerahkannya pada putusan pengadilan. **(uzi/c9/any)**

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tiga Bangunan RKB Selesai

Guru, Staf dan Komite SMAN 4 Sidoarjo Gelar Tasyakuran Potong Tumpeng

Sidoarjo, Memo X

Puluhan guru, staf dan komite SMAN 4 Sidoarjo menggelar acara tasyakuran, Rabu (18/01/2023). Gelaran tasyakuran sederhana itu diisi dengan pemotongan tumpeng di dalam tiga unit Ruang Kelas Baru (RKB). Syukuran ditandai dengan pemotongan tumpeng yang dilaksanakan Kepala SMAN 4 Sidoarjo, Dr Imam Jawahir dan diserahkan kepada Ketua Komite SMAN 4 Sidoarjo, Djoko Susilohadi. Sedangkan pembacaan doa dipimpin Samiaji Makin Rahmat.

Kepala SMAN 4 Sidoarjo, Dr Imam Jawahir mengatakan penambahan bangunan tiga RKB sangat dibutuhkan SMAN 4 Sidoarjo. Oleh karena itu, dirinya bersyukur mendapatkan bantuan dana swakelola untuk pembangunan rumah kelas baru itu.

"Sebelum ada ruang kelas baru ini, para peserta didik kekurangan kelas. Jadi yang sebelumnya menempati rumah laboratorium IPA, bisa langsung menempati ruang kelas baru ini. Setelah RKB ditempati, maka sudah tidak ada lagi siswa yang belajar di ruang laboratorium," ujar Dr Imam Jawahir kepada Memo X, Rabu (18/01/2023) di sela-sela acara tasyakuran.

Lebih jauh, Imam Jawahir



TUMPENGAN - Para guru, komite sekolah serta para staf SMAN 4 Sidoarjo mengikuti acara tasyakuran dengan memotong sejumlah tumpeng atas selesainya pembangunan tiga unit Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun Tahun 2022 kemarin, Rabu (18/01/2023).

menjelaskan jika anggaran pembangunan ketiga RKB beserta bangku dan papan tulisnya menggunakan dana bantuan Provinsi Jawa Timur. Pembangunannya dikerjakan secara swakelola dengan hasil yang cukup maksimal dan bagus. "Insyaallah semua

pekerjaan dikerjakan dengan baik dan menggunakan mutu bahan bangunan yang sangat baik pula," ungkapnya.

Sementara Ketua Komite SMAN 4 Sidoarjo, Djoko Susilohadi menegaskan jika bangunan tiga RKB itu menelan anggaran sekitar

Rp 700 juta. Saat ini bangunan sudah selesai semua. "Kami berharap dengan tiga bangunan RKB ini, anak-anak peserta didik bisa belajar maksimal dan ruang laboratorium bisa dimanfaatkan kembali untuk ruang praktek semestinya," tandasnya. (par/wan)

memo X

Dinilai Berhasil Tetapkan IKM

Rombongan Kepala Sekolah se Ternate Malut Studi Tiru ke SMAN 4 Sidoarjo

Sidoarjo, Memo X

Sejumlah pengalaman SMAN 4 Sidoarjo setelah menjalankan penerapan program Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) 1 tahap pertama. Hasilnya, ternyata mendapat respon yang luar biasa. Salah satunya mendapat respon dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Ternate, Maluku Utara (Malut). Rombongan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri dan Swasta se Kota Ternate ini menggelar studi tiru (belajar) ke SMAN 4 Sidoarjo, Selasa (17/01/2023).

Kehadiran rombongan yang dipimpin Kepala Bidang SMA Dikbud Maluku Utara, Adjwan Ade ini bersama Ketua MKKS SMA se Ternate Mustamin Lila. Rombongan disambut Kepala SMAN 4 Sidoarjo, Dr Imam Jawahir bersama jajarannya di Aula SMAN 4 Sidoarjo.

Ketua MKKS SMA Negeri dan Swasta se Kota Ternate, Mustamin Lila mengatakan jika kunjungannya ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini untuk berkunjung ke 4 sekolah. Tiga diantaranya ke sekolah Program Sekolah Penggerak (PSP) dan yang satu sekolah IKM.

"Tujuan kunjungan kami ini untuk sharing ilmu, belajar tentang PSP dan pengelolannya. Terutama di SMAN 4 Sidoarjo ini yang menjadi sekolah penggerak angkatan pertama. Kalau kami ini PSP kedua dan IKM. Sehingga sangat membutuhkan masukan dan pengalaman dalam pengelolaan



STUDI TIRU - Rombongan Dikbud Ternate, Malut bersama pengurus MKKS SMA Negeri dan Swasta se Kota Ternate ini menggelar studi tiru ke SMAN 4 Sidoarjo, Selasa (17/01/2023).

sekolah penggerak seperti yang sudah dilakukan SMAN 4 Sidoarjo. Saya sangat bersyukur dan alhamdulillah ternyata semua yang kami cari ada di sini," ujar Mustamin Lila kepada Memo X, Selasa (17/01/2023).

Selain itu, Mustamin Lila menguraikan hasil kunjungan studi ini, tidak cukup hanya sampai di sini saja. Akan tetapi, nantinya akan ditindaklanjuti dengan pertukaran siswa ataupun pertukaran guru. Kemungkinan guru-guru yang dari Maluku Utara akan terlebih lebih dahulu menimba ilmu seminggu atau dua minggu di sini.

"Khususnya yang guru IKM

akan saya minta belajar lebih matang lagi di SMAN 4 Sidoarjo ini," tegasnya.

Sementara Kepala SMAN 4 Sidoarjo, Dr Imam Jawahir menilai kunjungan ini menjadi bagian dari program untuk menyampaikan dan berkolaborasi dengan sejumlah sekolah yang ingin menerapkan IKM. Sedangkan kewajiban SMAN 4 Sidoarjo yakni berbagi praktik baik agar bisa berimbas ke sejumlah sekolah lainnya.

"Materi apa yang bisa ditiru, yang bisa dijadikan praktik baik oleh kepala sekolah yang saat ini baru melaksanakan IKM semua diberikan dan disampaikan.

Baik itu, bentuk merdeka belajar, merdeka berubah maupun merdeka berbagi," papar Imam Jawahir.

Sedangkan beberapa materi pokok yang diberikan, kata mantan Kepala SMK Antartika 2 ini diantaranya terkait kurikulum operasional satuan pendidikan, program pemilihan peminatan mata pelajaran seta berikutnya Modul Ajar dan Modul Projek P5.

"Jadi selama tiga tahun sekolah kami sudah menjalankan ketujuh projek itu. Penerapannya tahun pertama 3 projek, tahun kedua 3 projek dan tahun ketiga 1 projek," pungkasnya. (par/wan)